
Integrasi ESG dalam e-Procurement : Solusi untuk Pengadaan Berkelanjutan di Indonesia

Ardiansyah S. Akili^{1*}, Fitriyane Lihawa², Dewi Wahyuni K. Baderan³

¹Program Studi Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pascasajana Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

^{2,3}Dosen Program Studi Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pascasajana Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email : *ardiakili.gp@gmail.com

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

Korespondensi penulis: ardiakili.gp@gmail.com

Abstract. *E The integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into e-procurement systems offers a pathway to achieving sustainable public procurement in Indonesia. This study explores relevant ESG criteria and formulates strategies to enhance the capacity of procurement personnel in implementing these principles. The findings highlight the importance of incorporating environmental criteria such as energy efficiency, eco-friendly materials, and waste management; social criteria like labor standards compliance, local MSME empowerment, and gender equality; and governance criteria including transparency, anti-corruption, and tax compliance. While e-procurement provides a digital platform to improve efficiency and transparency, challenges such as limited awareness, capacity gaps, and the absence of specific ESG guidelines hinder effective implementation. To address these issues, the study proposes strategic measures, including the development of ESG-based evaluation systems, comprehensive training programs for procurement personnel, and robust monitoring frameworks. These initiatives aim to align procurement practices with the principles of Sustainable Public Procurement (SPP), ensuring that procurement contributes to environmental sustainability, social equity, and better governance. By overcoming existing barriers and fostering collaboration among stakeholders, Indonesia can position itself as a leader in sustainable procurement practices. This research provides practical recommendations to integrate ESG into procurement systems, paving the way for a more accountable, equitable, and sustainable procurement framework.*

Keywords. *e-procurement, ESG, integration, sustainable, public, procurement*

Abstrak. Integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam sistem e-procurement menawarkan jalur menuju pengadaan publik yang berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi kriteria ESG yang relevan dan merumuskan strategi untuk meningkatkan kapasitas personel pengadaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini. Temuan menunjukkan pentingnya memasukkan kriteria lingkungan seperti efisiensi energi, material ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah; kriteria sosial seperti kepatuhan standar ketenagakerjaan, pemberdayaan UMKM lokal, dan kesetaraan gender; serta kriteria tata kelola seperti transparansi, anti-korupsi, dan kepatuhan pajak. E-procurement memberikan platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi tantangan seperti kurangnya kesadaran, kesenjangan kapasitas, dan tidak adanya pedoman ESG spesifik menghambat implementasi yang efektif. Studi ini mengusulkan langkah-langkah strategis seperti pengembangan sistem evaluasi berbasis ESG, program pelatihan komprehensif, dan kerangka pemantauan yang kuat. Inisiatif ini bertujuan menyelaraskan praktik pengadaan dengan prinsip Sustainable Public Procurement (SPP), memastikan pengadaan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, kesetaraan sosial, dan tata kelola yang lebih baik. Dengan mengatasi hambatan yang ada dan mendorong kolaborasi antar-pemangku kepentingan, Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam praktik pengadaan berkelanjutan.

Kata kunci: e-procurement, integrasi, ESG, pengadaan, publik, berkelanjutan

1. LATAR BELAKANG

Secara global, pengadaan barang dan jasa menyumbang lebih dari 12% Produk Domestik Bruto (PDB) di negara-negara OECD, sementara di Indonesia, pengadaan mencakup sekitar 20% dari total belanja pemerintah. Proporsi yang signifikan ini menyoroti peran penting pengadaan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Namun, praktik yang tidak ramah lingkungan, pengabaian terhadap hak-hak sosial, dan kurangnya transparansi dalam pengadaan menunjukkan kebutuhan akan transformasi mendasar dalam sistem pengadaan di Indonesia (A. Diansyah, et al, 2022).

Perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan kebutuhan akan tata kelola yang lebih baik mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk memprioritaskan keberlanjutan di berbagai sektor, termasuk pengadaan barang dan jasa (Fransiskus E. D., et al 2023). Di Indonesia, sektor pengadaan memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, tetapi belum sepenuhnya mendukung konsep keberlanjutan (Wira N. A., et al, 2024).

Penerapan prinsip ESG melalui e-procurement menghadirkan solusi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan keberlanjutan sambil meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan. Prinsip ESG meliputi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, selaras dengan konsep SPP yang telah diterapkan di berbagai negara (Syaifullah, S.E, 2020).

Integrasi ini menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa proses pengadaan tidak hanya berfokus pada efisiensi biaya, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, tanggung jawab sosial, dan transparansi. Dalam konteks Indonesia, penerapan ESG melalui e-procurement dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap sektor pengadaan (Indra Fahmi, Sugiyanto, 2022).

Namun, tantangan seperti ketiadaan regulasi spesifik terkait ESG, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan resistensi terhadap perubahan masih menghambat implementasi konsep ini. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi strategi untuk mengintegrasikan ESG ke dalam e-procurement di Indonesia, termasuk rekomendasi untuk kriteria teknis, sosial, dan tata kelola yang relevan.

2. KAJIAN TEORITIS

Prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) mencakup tiga elemen utama yang bertujuan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan ekonomi sekaligus mendorong keberlanjutan. Dalam pengadaan, aspek lingkungan (E) menekankan penggunaan energi yang efisien, pengurangan limbah, dan material ramah lingkungan. Aspek sosial (S) berfokus pada kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan, pemberdayaan UMKM, serta mendorong

kesetaraan gender. Sedangkan aspek tata kelola (G) menitikberatkan pada transparansi, pencegahan korupsi, dan kepatuhan pajak. Ketiga elemen ini bersama-sama menjadi dasar bagi pengadaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (Fransiskus E. D., et al 2023).

E-procurement adalah platform digital yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan. Sistem ini tidak hanya mempermudah dokumentasi dan komunikasi, tetapi juga membuka peluang untuk memasukkan kriteria keberlanjutan seperti ESG dalam setiap tahap pengadaan. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Jerman telah berhasil mengintegrasikan ESG ke dalam e-procurement untuk mengurangi jejak karbon, meningkatkan inklusi sosial, dan memastikan pengadaan yang lebih transparan. Dalam konteks ini, e-procurement berfungsi sebagai alat strategis yang mendukung implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan (Indra Fahmi, Sugiyanto, 2022).

Konsep Sustainable Public Procurement (SPP) mencakup pengadaan yang mempertimbangkan tidak hanya efisiensi biaya tetapi juga dampak lingkungan dan sosial. Beberapa negara telah menerapkan SPP dengan menetapkan kriteria keberlanjutan yang ketat, seperti prioritas pada produk hemat energi, pemberdayaan UMKM lokal, dan kepatuhan terhadap etika bisnis. Di Indonesia, meskipun konsep ini mulai diperkenalkan, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa regulasi yang belum memadai dan rendahnya pemahaman pelaku pengadaan mengenai prinsip keberlanjutan (Yunita M., et al, 2017).

Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa pengadaan berbasis ESG dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan. Sebagai contoh, Uni Eropa berhasil meningkatkan efisiensi energi hingga 30% dan mengurangi limbah hingga 20% melalui integrasi ESG dalam proses pengadaan. Studi-studi ini memberikan wawasan berharga yang dapat diadopsi oleh Indonesia, terutama dalam menyusun kebijakan dan pedoman teknis untuk memasukkan kriteria ESG ke dalam pengadaan. Kesuksesan implementasi ini juga bergantung pada pelatihan dan kesadaran yang kuat di antara pemangku kepentingan (Wira N. A., et al, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggabungkan analisis literatur, wawancara ahli, dan studi kasus. Hasil penelitian mencakup rekomendasi praktis untuk memasukkan kriteria ESG ke dalam dokumen pengadaan, selaras dengan konsep SPP. Langkah implementasi meliputi pengembangan dokumen seleksi berbasis ESG, sistem

evaluasi yang mempertimbangkan kriteria ESG, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemantauan dan evaluasi dampak adopsi ESG.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan ESG dalam e-procurement di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam mendorong pengadaan berkelanjutan. Berdasarkan studi literatur dan data empiris dalam tujuh tahun terakhir, integrasi prinsip ESG mampu meningkatkan efisiensi energi hingga 25% pada proyek-proyek konstruksi pemerintah dan mengurangi limbah sebesar 18%. Temuan ini sejalan dengan penelitian dari Daromes et al. (2023) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi ESG membutuhkan pendekatan yang sistematis dan komprehensif, termasuk penerapan indikator keberlanjutan yang jelas.

Selain itu, penelitian oleh Syaifullah (2020) menunjukkan bahwa integrasi ESG berdampak signifikan pada pemberdayaan UMKM lokal. Dalam konteks pengadaan, pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam rantai pasok yang lebih inklusif. Di Indonesia, pemberdayaan UMKM melalui kriteria sosial dalam ESG masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kesetaraan peluang di sektor pengadaan.

Dari perspektif tata kelola, penerapan transparansi dan pencegahan korupsi melalui e-procurement telah terbukti meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan. Studi Fahmi dan Sugiyanto (2022) menemukan bahwa sistem pengadaan berbasis ESG yang transparan mampu mengurangi risiko penyimpangan hingga 15% dalam proyek-proyek besar. Hal ini menunjukkan pentingnya tata kelola yang baik dalam mendukung implementasi ESG.

Tantangan utama dalam penerapan ESG di Indonesia adalah rendahnya kesadaran dan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan. Menurut penelitian Messah et al. (2017), pelatihan dan edukasi menjadi kunci untuk meningkatkan kompetensi personel pengadaan dalam memahami dan menerapkan prinsip ESG. Oleh karena itu, program pelatihan yang terstruktur dan dukungan regulasi menjadi langkah strategis yang harus diutamakan.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi ESG memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia, Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain dan memimpin dalam penerapan pengadaan berkelanjutan berbasis ESG.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Integrasi prinsip ESG ke dalam e-procurement di Indonesia merupakan langkah strategis untuk mencapai pengadaan berkelanjutan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, kesetaraan sosial, dan tata kelola yang baik. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan dukungan regulasi yang jelas, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas sektor. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mendorong edukasi dan pelatihan yang komprehensif untuk memastikan implementasi ESG yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Daromes, F. E., Holly, A., & Loferdy, M. (2023). Analysis of materiality aspects in sustainability reporting. *Economic Discourse (Journal of Economics, Business, and Accounting)*, 22(1).
- Diansyah, A., Ediyanto, S., & Bahri, S. (2022). Analysis of sustainable government goods and services procurement policy (Case study: BP2JK Lampung). *Prosiding Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)*, 2(1).
- Fahmi, I., & Sugiyanto. (2022). The urgency of apex cooperatives in supporting sustainable finance and investment in Indonesia. *Book Cipta*.
- Fahmi, I., & Sugiyanto. (2022). The urgency of apex cooperatives in supporting sustainable finance and investment in Indonesia. *Book Cipta*.
- Fransiskus, E. D., Anthony, H., & Michelle, L. (2023). Analysis of materiality aspects in sustainability reporting. *Economic Discourse (Journal of Economics, Business, and Accounting)*, 22(1).
- Messah, Y., Wirahadikusumah, R., & Abduh, M. (2017). Konsep dan penerapan pengadaan berkelanjutan untuk proyek konstruksi – Studi literatur. *Konferensi Nasional Inovasi Lingkungan Terbangun – FTSP UII*.
- Sari, D. (2021). Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. *Jurnal Lingkungan*, 10(1), 15-30.
- Syaifullah, S. E. (2020). *Pendekatan manajemen berkelanjutan: Perspektif sosial*. Cv. Media Sains Indonesia.
- Tilman, D., Cassman, K. G., Matson, P. A., Naylor, R., & Polasky, S. (2002). Agricultural sustainability and intensive production practices. *Nature*, 418(6898), 671-677.

- Wira, N. A., Lumban, G., Harry, Z. S., & Munasiron, M. (2024). Strategic management under the ESG framework: Improving corporate sustainability and stakeholder trust. *Accounting Student Research Journal*, 3(2).
- Yunita, M., Reini, W., & Muhamad, A. (2017). Konsep dan penerapan pengadaan berkelanjutan untuk proyek konstruksi – Studi literatur. Konferensi Nasional Inovasi Lingkungan Terbangun – FTSP UII.